

REFORMASI PENDIDIKAN PADA MASA JEPANG MEIJI: STUDI TENTANG PERAN POLITIK KEKUASAAN DALAM PENERAPAN PENDIDIKAN

Ferry Rustam

Jurusan Sastra Asia Timur, Program Studi Jepang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

E-mail: ferryrfr@yahoo.com

Abstrak

Pemerintah Meiji melaksanakan beberapa kebijakan baru tentang pendidikan yang dilaksanakan mendasar secara sosial, yaitu dengan mengubah kesadaran dari setiap orang terhadap fungsi negara. Orang Jepang yang pada masa pemerintahan Tokugawa masih berfikir kedaerahan, pada masa Meiji diharuskan mempunyai pemikiran atau kesadaran nasional (satu kebijakan pendidikan yang bersifat nasionalistik). Perubahan kesadaran dari kedaerahan menjadi nasional inilah yang merupakan hasil terpenting yang dilakukan oleh pemerintah Meiji dalam bidang pendidikan.

Abstract

The Meiji administration issued some new policies on education which were basically carried out socially by transforming the awareness of each citizen on the role of the state. The Japanese during the Tokugawa era were still bound by provincialism, whereas in the Meiji era they were obliged to have a national consciousness based on a nationalistic educational policy. The transformation of the provincial awareness to the nationalistic one is the most significant change carried out by the Meiji administration in the domain of education.

Keywords: nationalistic educational policy (gimu kyōiku seisaku)

1. Pendahuluan

Zaman Meiji Jepang adalah satu masa pemerintahan Jepang dari tahun 1868 sampai dengan 1912 yang ditandai dengan perubahan besar-besaran di semua bidang kehidupan masyarakat. Perubahan paling utama adalah dibukanya kembali negara Jepang terhadap bangsa-bangsa asing. Jepang yang selama sekitar 2,5 abad menutup diri karena politik pemerintahan Tokugawa akhirnya menyadari bahwa ternyata mereka tertinggal kemajuannya akibat politik isolasi yang dijalankan Tokugawa.

Pemerintahan Meiji ingin mengadakan pembaharuan terutama dengan merubah Jepang dari negara pertanian menjadi negara industri. Pada masa awal Meiji, bangsa-bangsa Eropa dan Amerika ternyata telah lebih dahulu sekitar 100 tahun menjadi negara-negara industri. Dan dari sejarah Jepang dapat diketahui bahwa ternyata kira-kira 100 tahun sesudah masa Meiji, Jepang mengalami kemajuan yang mengikuti negara-negara maju lainnya

di dunia. Langkah-langkah yang menjadi catatan sejarah dunia tentang kemajuan Jepang seperti ini disebabkan oleh satu faktor utama, yaitu hasil pelaksanaan pendidikan oleh pemerintah Meiji. Itulah sebabnya para ahli menyebutkan zaman Meiji sebagai sebuah masa reformasi atau pembaharuan. Perkembangan sistem pendidikan yang berlangsung di Jepang pada masa Meiji, tidak lepas dari pengaruh faktor politik yang berkembang saat itu, dan faktor keadaan perkembangan internasional.

Pertanian yang dilaksanakan di Jepang sampai dengan masa Tokugawa adalah pertanian tradisional dengan teknologi untuk produksi minimal. Sementara itu industri memerlukan teknologi untuk produksi massal. Yang membedakan industri dan pertanian ditinjau dari segi teknologi tersebut adalah pasar, tempat hasil produksi dijual. Industri membutuhkan pasar yang sangat besar dalam skala nasional, sementara pertanian dapat dilaksanakan dengan pasar yang tidak besar dalam skala lokal. Pada masa Tokugawa sistem pemerintahan

adalah sistem *Baku-han*, yaitu sistem pemerintahan daerah, sedangkan pada masa Meiji pemerintahan terpusat pada Kaisar. Meskipun sistem politik terpusat, pada kenyataannya sistem sosial masih bersifat kedaerahan. Karena itu pemerintah Meiji ingin mengubah sistem sosial menjadi terpusat, dengan tujuan agar tercipta pasar nasional. Perubahan terbesar yang dilakukan pemerintah Meiji untuk mewujudkan hal tersebut membentuk negara industri adalah dengan melaksanakan pembaharuan pendidikan, yaitu dengan melancarkan kebijakan pendidikan wajib (*gimu kyoiku*) secara nasional.

Pada masa sebelum Meiji di Jepang sudah ada lembaga pendidikan *Terakoya* yang diperuntukkan bagi pendidikan rakyat biasa. Lembaga pendidikan ini berdasarkan pada Konfusianisme. Setelah masa Meiji, barulah dikembangkan sistem pendidikan Barat. Sistem tersebut masuk ke Jepang dengan adanya perubahan politik pada masa itu. Sebagai akibat dari diadakannya politik pintu terbuka, maka pada masa itu banyak dikirim para pelajar Jepang ke Barat. Di samping itu juga digaji oleh pemerintah Jepang para pengajar asing (*oyatoi gaikokujin*) yang didatangkan dari luar negeri. Para pengajar asing ini lah yang membawa pemikiran pendidikan Barat serta buku-buku teks dan peralatan pengajaran Barat ke Jepang (Beauchamp 1991).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode deskripsi analisis. Pendekatan penelitian melalui pendekatan ilmu sejarah, terutama sejarah sosial dengan fokus pada kebijaksanaan pemerintah Jepang dalam bidang pendidikan. Sejarah yang ditelaah, yaitu pada zaman Meiji mengenai politik pemerintah Meiji di bidang pendidikan. Pada masa itu ada kepentingan-kepentingan kekuasaan pemerintah Meiji untuk merubah kesadaran masyarakat dari bersifat kedaerahan ke nasionalistik. Pemerintah Meiji menyadari bahwa pendidikan adalah unsur yang paling mendasar dalam perubahan kesadaran masyarakat.

3. Analisis dan Interpretasi Data

3.1. Perkembangan Politik dalam Negeri Jepang dan Situasi Internasional

Dengan politik “negeri terbuka” yang terpaksa dilakukan pemerintah, terjadilah pergeseran sistem pemerintahan negara dari sistem politik feodalistik kedaerahan ke sistem politik negara yang terpusat pada Kaisar sebagai pemegang kekuasaan mutlak.

Pada masa ini, pertengahan abad 19, di negara-negara barat sedang berkembang industri sebagai akibat revolusi industri. Karena itu, mekanisasi industri, dan model produksi yang berkaitan dengan pemikiran-

pemikiran liberalisme dan individualisme abad 18 pun berkembang pula, dengan kata lain berkembanglah kapitalisme modern. Paham kapitalisme seperti ini lah yang masuk ke Jepang pada awal masa Meiji seiring dengan masuknya pengaruh Barat. Dan dengan memperhatikan perkembangan sejarah seperti ini dapatlah dikatakan bahwa politik negeri terbuka bukan kemauan Jepang, tetapi lebih disebabkan oleh desakan negara-negara Barat, jadi bukan oleh karena faktor internal, melainkan eksternal.

Sementara itu di dalam negeri terjadi gerakan untuk menentang kedatangan orang Barat (*sonnojoji*) pada akhir masa Tokugawa dengan mengatasnamakan kaisar.

Pemerintah Meiji menyadari bahwa Jepang tidak sekuat negara-negara Barat. Karena itu, pemerintah mengeluarkan seruan *Fukoku Kyohei* yang berarti negara kaya militer kuat, agar dapat mencapai posisi sejajar dengan negara-negara Barat, dan agar tidak diduduki oleh negara-negara Barat. Dan untuk mewujudkan *Fukoku Kyohei* pemerintah memberi prioritas pada masalah-masalah penguatan militer dan pendidikan rakyat.

Dengan kondisi seperti itu, pemerintah Meiji sama juga dengan kecenderungan yang ada pada bangsa-bangsa lainnya pada masa itu, mencoba menerapkan politik “nasionalisme.” Karena itu, tindakan awal pemerintah Meiji dalam kerangka membentuk sistem negara absolut adalah menerapkan wajib militer (*Choheirei*), dan sistem pendidikan wajib (*Gimu Kyoiku* dengan sistem *Gakusei*).

3.2. Dasar-Dasar Reformasi Meiji

Reformasi Meiji menandai mulainya perubahan dari masyarakat feodal menuju ke masyarakat kapitalis. Tetapi sebenarnya, pemikiran *Sonnojoji* yang mengagungkan Kaisar dan mengusir orang Barat yang menjadi tenaga pendorong reformasi tersebut bukanlah berakar pada semangat modern yang non-feodal. Pemikiran ini berdasarkan pada ajaran Konfusius yang menetapkan posisi seseorang dalam masyarakat Jepang menurut kehormatan dan kewajibannya (loyalitas) yang dilaksanakan pemerintah Tokugawa untuk mempertahankan kekuasaannya. Kalau diperhatikan sistem ini tampak bahwa masyarakat Jepang secara internal (ke dalam) menerapkan hubungan loyalitas antara rakyat dengan penguasa, sedangkan secara eksternal (ke luar), menentang kehadiran orang Barat. Karena itu, dari sudut pandang ini dapatlah dikatakan bahwa Jepang adalah satu-satunya bangsa di dunia yang mempunyai bentuk negara superior yang sangat kaku dalam aturan loyalitas.

Pemikiran yang mengagungkan Kaisar tersebut sebenarnya bukanlah menghapuskan sistem feodal,

tetapi justru menggunakan kegagalan pemerintah Tokugawa mengatasi Barat, kemudian memperkuat kekuasaan Kaisar sebagai kebijakan negara pusat untuk menghadapi Barat. Dan dengan berpijak pada ide loyalitas feodal absolut, pemerintahan Meiji awal membangun kembali masyarakat feodal sebagai kekuatan negara terpusat untuk menghadapi Barat. Ide pemikiran seperti ini berkembang di Jepang pada awal pemerintahan Meiji. Dengan demikian berarti reformasi Meiji bukanlah merupakan peralihan dari masyarakat feodal ke masyarakat kapitalis, tetapi merupakan pengembalian bentuk pemerintahan kuno sebagai pemerintahan kekaisaran, dengan membangun kembali negara berdasarkan ide hubungan loyalitas menurut ajaran Konfusius.

Jepang Meiji yang menerapkan kapitalisme sebagai kebijakan membentuk negara kaya untuk mengejar ketertinggalannya dari Barat, menempuh cara yang sangat berbeda dengan penerapan kapitalisme oleh negara-negara Barat yang sudah maju. Pemerintah Meiji dengan cepat mengadopsi sistem dan pemikiran-pemikiran Barat, dan dengan menerapkan industri modern secara cepat pula berharap dapat segera menyamakan kedudukannya dengan negara-negara Barat.

Untuk itu pemerintah Meiji menetapkan dua sasaran utama politik, yaitu *Fukoku Kyohei* dan *Bunmei Kaika* (Negara Kaya Militer Kuat, dan Pencerahan Peradaban). Cara yang dilakukan adalah seiring dengan politik 'negeri terbuka,' yaitu dengan cepat memasukkan sebanyak-banyaknya peradaban dan kebudayaan Barat.

Pada awalnya pemerintahan Meiji lebih memusatkan perhatian pada pengaturan perekonomian nasional daripada penerapan industri modern yang diperlukan untuk mewujudkan *Fukoku Kyohei*. Dan pada tahap perkembangan selanjutnya dengan kondisi keuangan yang cukup memadai, pemerintah lalu menerapkan kebijakan dunia usaha untuk kalangan pemilik modal swasta. Namun para pemilik modal ini adalah para pengusaha kuat yang mendapat bantuan keuangan pada masa Restorasi Meiji, jadi mereka adalah para kapitalis yang mempunyai hubungan khusus dengan pemerintahan baru Meiji. Dengan demikian penerapan kapitalisme di Jepang sebagai kapitalisme nasionalistis merupakan perkembangan kapitalisme monopoli negara dengan cara pemerintah membina hubungan bisnis antara kapitalis dengan kalangan militer, antara kapitalis dengan kalangan birokrat yang terus berkembang di dalam dunia industri Jepang sampai pada masa-masa panjang sesudah masa Meiji awal.

3.3. Kebijaksanaan Politik di Bidang Pendidikan

Kebijaksanaan politik yang dijalankan dalam modernisasi pendidikan pada masa Meiji dapat

diketahui dengan dilaksanakannya sistem pendidikan yang disebut *Gakusei* yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Jepang (1872) yang memuat rencana sistem pendidikan secara umum. Sistem pendidikan tersebut diatur dan dilaksanakan seluruhnya oleh Departemen Pendidikan yang sekaligus juga membuat kurikulum dan buku pelajaran berdasarkan buku-buku Barat yang diberlakukan sama untuk seluruh Jepang. Dengan pedoman sistem pendidikan Barat ini diadakan pembangunan Sekolah Dasar sekitar 53.000 buah yang menerapkan sistem pendidikan Barat bagi anak-anak yang berusia 8 tahun hingga 14 tahun. Selain itu dibangun pula sekolah menengah dan universitas-universitas.

Sistem pendidikan Barat tersebut yang seakan dipaksakan oleh pemerintah mengakibatkan pemerintah gagal dalam mewujudkannya. Kegagalan tersebut diakibatkan karena (1) mahal biaya pendidikan bagi siswa dan (2) materi pelajaran yang terlalu tinggi, karena hasil adopsi langsung dari Barat, dan tidak sesuai dengan budaya Jepang, serta tidak cocok dengan kebutuhan pendidikan di daerah-daerah. Akibat kegagalan tersebut timbullah perlawanan dari rakyat terutama di daerah-daerah terhadap kebijakan sistem pendidikan tersebut.

Mengingat adanya perlawanan rakyat yang menghancurkan berbagai bangunan sekolah pada masa itu, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan politik baru, yaitu *Kyoikurei* tahun 1879. (Makoto, 1972:7) Sistem *Kyoikurei* adalah hasil penyempurnaan dari sistem sebelumnya. Berbeda dengan *Gakusei*, sistem ini agak longgar. *Kyoikurei* memuat aturan untuk menerapkan desentralisasi pendidikan dengan mengizinkan daerah-daerah mendirikan sekolah, dan membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sistem ini ditiru dari sistem administrasi sekolah Amerika, dan dirancang untuk desentralisasi kekuasaan pemerintah dalam dunia pendidikan melalui pengurangan kendali pemerintah pusat. Namun pada dasarnya pengawasan negara dalam bidang pendidikan tidak berubah. Dengan sistem tersebut sekolah-sekolah yang pada mulanya liberal karena pengaruh Barat menjadi konservatif, dengan memberi penekanan pada pendidikan moral berdasarkan Konfusianisme.

4. Kesimpulan

Dengan kebijakan politik tentang pendidikan wajib yang dilaksanakan di seluruh Jepang, pemerintah Meiji mengadakan perubahan mendasar secara sosial, yaitu dengan merubah kesadaran setiap orang terhadap fungsi negara. Orang Jepang yang pada masa pemerintahan Tokugawa masih berfikir kedaerahan, pada masa Meiji diharuskan mempunyai pemikiran atau kesadaran nasional (satu kebijakan pendidikan yang bersifat

nasionalistik). Perubahan kesadaran orang per orang dari kedaerahan menjadi nasional seperti ini lah yang merupakan hasil terpenting perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Meiji dalam bidang pendidikan.

Daftar Acuan

Aso, Makoto, Ikuo Amano. 1972. *Education and Japan's Modernization*. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs.

Beauchamp, Edward R. 1991. "The Development of Japanese Educational Policy 1945—1985", dalam

Windows of Japanese Education. Connecticut: Greenwood Press.

Bethel, Dayle Morgan. 1994. *Makiguchi The Value Creator: Revolutionary Japanese Educator and Founder of Soka Gakkai*. Tokyo: Weatherhill.

Bethel, Dayle Morgan. 1971. *The Life and Thought of Tsunesaburo Makiguchi: His Contribution to Education*. Michigan: Umi.

Hiroko, Hara. 1974. *Shitsuke*. Tokyo: Kobundo.

Taka, Akabori. 1973. *Nihon Kyoiku-shi*. Tokyo: Kokudo-sha.